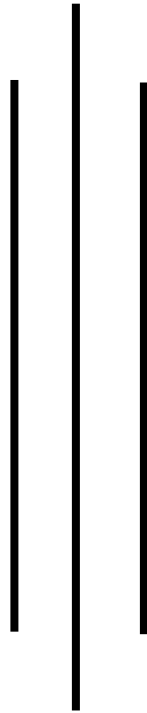




**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BUKIT BATU**

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023
KECAMATAN BUKIT BATU**



**SUNGAI SELARI
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga dapat menyelesaikan dengan baik penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Awal OPD) Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Awal OPD) Kecamatan Bukit Batu ini merupakan implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) ini dikemukakan aktifitas yang akan dilakukan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis tahun 2023 kedepan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Awal OPD) Kecamatan Bukit Batu ini. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Awal - OPD ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaannya. Semoga Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Awal OPD) ini dapat bermanfaat, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sungai Selari, Februari 2022

CAMAT BUKIT BATU



**TAUFIK HIDAYAT, SSTP. MPA
PEMBINA
NIP. 19821205 200212 1 001**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	25
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.....	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	37
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	37
3.3 Program dan Kegiatan.....	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	39
BAB V PENUTUP.....	50
Lampiran	

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1. Realisasi Anggaran Kecamatan Bukit Batu.....	6
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bukit Batu.....	11
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Organisasi.....	12
Tabel 2.4. Pengukuran indek kepuasan masyarakat tahun 2021.....	13
Tabel 2.5. Interval Penilaian Kinerja.....	16
Tabel 2.6. Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat.....	16
Tabel 2.7. Pengukuran indek kinerja desa tahun 2021.....	21
Tabel 2.8. Meningkatnya Kinerja Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban.....	22
Tabel 2.9. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Bengkalis.....	24
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Bukit Batu.....	32
Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Perkiraan maju Tahun 2024 Kabupaten Bengkalis.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran kerja tahunan dari setiap Rencana Strategis OPD (Renstra OPD).

Renja OPD disusun sebagai dokumen yang akan dibahas pada Forum OPD yang nantinya merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah dilakukannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dearah. Maka keberadaan Undang-undang tersebut sebagai salah satu produk hukum menjadi alat penting dan strategis dalam merespon berbagai tuntutan perubahan kearah pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dimaksud, telah membawa perubahan mendasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah, hal ini ditandai dengan adanya perubahan manajemen dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yaitu pelaksanaan yang sentralistik kearah pelaksanaan yang desentralistis, demokratis dan otonom. Masyarakat sangat mengharapkan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dapat mengembangkan kebijakan yang efektif dan efesien dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan intensitas pembangunan yang berkelanjutan dan bangkitnya pembangunan Kecamatan Bukit Batu yang berwawasan masa depan.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan – peraturan tersebut, serta untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), serta lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas maupun fungsinya, maka berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016, dibentuklah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam mengimplementasikan kinerjanya yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas Kinerja, maka disini dapat disajikan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA – OPD) Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

Penyusunan Renja OPD mesti memperhatikan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026, Renstra OPD dan Renja Kementerian atau Lembaga Negara terkait serta Renja OPD Provinsi dan RPJMD Provinsi, yang seluruhnya akan digunakan sebagai bahan di dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.

Dalam hal pembangunan daerah, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selaras dengan ketentuan tersebut, sistem pembangunan yang demikian diharapkan akan dapat menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kecamatan Bukit Batu dengan mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat sehingga terwujudnya pembangunan di Kecamatan Bukit Batu khususnya dan Kabupaten Bengkalis umumnya secara berkeadilan, efisien, efektif dan berkelanjutan.

1.2 Landasan hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan di lingkungan Kabupaten Bengkalis.

1.3 Maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud dari Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan suatu acuan resmi bagi seluruh aparatur Kecamatan Bukit Batu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
- b. Menyediakan suatu tolok ukur atau standarisasi pencapaian kinerja Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan serta memperbaiki kinerja dimasa mendatang setiap OPD.
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Bukit Batu sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis.
- d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bukit Batu dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bukit Batu untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
- f. Memberikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih intens lagi dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bukit Batu adalah :

- a. Tersusunnya perencanaan untuk memberikan arah pada penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bukit Batu.

- b. Tersusunnya perencanaan sebagai dasar utama bagi setiap bagian dalam menyusun program kegiatan kedepan sesuai dengan potensi yang ada dan kemampuan dana yang tersedia.
- c. Tersusunnya perencanaan Kecamatan Bukit Batu yang komprehensif, transparansi, akuntabel dan partisipatif selaras dengan visi dan misi Kecamatan Bukit Batu yang berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tercermin dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021 – 2026.

1.4 Sistematika penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukit Batu Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman dan arah kerja Pemerintah Kecamatan Bukit Batu, dengan sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 tahun yang lalu telah dianggarkan dana sebesar Rp. 8.761.083.156,- setelah Perubahan menjadi sebesar Rp.9.115.068.726,- karena terdapat beberapa kegiatan ada penambahan pagu anggaran..

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 yang lalu, secara rata- rata seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi target yang telah di rencanakan. realisasi rata- rata renja tahun anggaran 2021 untuk realisasi keuangan sebesar 89.95 % dan realisasi fisik 100 %. Hal ini menunjukkan adanya efesiensi dan peningkatan kinerja pemerintahan yang semakin membaik. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Kecamatan Bukit Batu Tahun Anggaran 2021

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	(Rp)	Fisik (%)
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.544.858.626	5.815.445.578	88.86	100
A	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.673.200	54.773.200	90.28	100
a	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.521.600	49.911.600	89.90	100
b	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.151.600	4.861.600	94.37	100
B	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.072.642.787	3.492.763.642	85.76	100
a	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.072.642.787	3.492.763.642	85.76	100
C	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	240.312.000	240.312.00	100	100
	Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	240.312.000	240.312.000	100	100
D	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.461.000	55.885.078	77.12	100
a	Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan	5.500.000	5.500.000	100	100

	Prasarana Disiplin Pegawai				
b	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	66.961.000	50.385.078	75.25	100
E	Kegiatan : Administrasi Umum Prangkat Daerah	601.116.500	554.135.917	92.18	100
a	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	21.220.000	21.219.750	100	100
b	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.863.400	86.855.400	99.99	100
c	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.495.000	96.495.000	100	100
d	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.849.100	37.136.150	86.67	100
e	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	27.120.000	27.120.000	100	100
f	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326.569.000	285.309.617	87.37	100
F	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	435.317.750	429.255.000	98.61	100
a	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	59.409.000	59.220.000	99.68	100
b	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	375.908.750	370.035.000	98.44	100
G	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	419.332.639	383.022.028	91.34	100
a	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	110.450.000	110.450.000	100	100
b	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	276.882.639	240.572.028	86.89	100
c	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.000.000	32.000.000	100	100
H	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643.002.750	605.298.713	94.14	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.290.000	57.182.245	70.34	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.120.000	69.894.468	90.63	100
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.400.000	230.400.000	100	100

	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	254.192.750	247.822.000	97.49	100
II	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	190.195.400	190.195.400	100	100
A	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	19.576.400	19.576.400	100	100
a	Sub Kegiatan : Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Intansi Vertikal Terkait	19.576.400	19.576.400	100	100
B	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	170.619.000	170.619.000	100	100
a	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	170.619.000	170.619.000	100	100
III	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.628.350.700	1.548.586.400	95.10	100
A	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	828.742.000	776.662.000	93.72	100
a	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	828.742.000	776.662.000	93.72	100
A	Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan	799.608.700	771.924.400	96.54	100
a	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	30.000.000	29.718.000	99.06	100
b	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	769.608.700	742.206.400	96.44	100
IV	Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.500.000	14.670.000	71.56	100
A	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.500.000	14.670.000	71.56	100
a	Sub Kegiatan : Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20.500.000	14.670.000	71.56	100
V	Program : Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	370.471.000	352.886.000	95.25	100

A	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	370.471.000	352.886.000	95.25	100
a	Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	204.346.000	203.246.000	99.46	100
b	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	166.125.000	149.640.000	90.08	100
VI	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.269.000	27.929.000	98.80	100
A	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.269.000	27.929.000	98.80	100
a	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.179.000	11.179.000	100	100
b	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17.090.000	16.750.000	98.01	100
VII	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	332.424.000	249.246.000	74.98	100
A	Kegiatan : Pembinaan, Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	332.424.000	249.246.000	74.98	100
a	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Penanganan Covid-19 di Desa dan Kelurahan	332.424.000	249.246.000	74.98	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi keuangan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 8.198.958.378,- atau 89.95 % dari anggaran sebesar Rp. 9.115.068.726,- Sedangkan untuk realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 100 %, artinya seluruh kegiatan terlaksana secara baik dan hampir mencapai target

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS

NO	Indikator	Satuan	SPM/Standar Nasional	IKM	Target Rentra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Pelayanan / Indeks kepuasan masyarakat	Nilai			88.85	89	92	92	92	89	92	92	
2	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	%			82%	84%	100%	100 %	88 %	84 %	100 %	100 %	
3	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	%			85.00%	85.25%	88%	88 %	88,25 %	85,25 %	88 %	88 %	
4	Nilai Sakip	Angka			B (60)	BB (70)	A (80)	A (80)	B (60)	BB (70)	A (80)	A (80)	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran	Indikator	Target	Relaisasi	%
Meningkatkan Kepuasan masyarakat	Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	92	82.07	89

Dari tabel di atas secara keseluruhan sasaran yang dicapai sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2021 oleh Pemerintah Kecamatan Bukit Batu menunjukkan pencapaian kinerja yang tinggi.

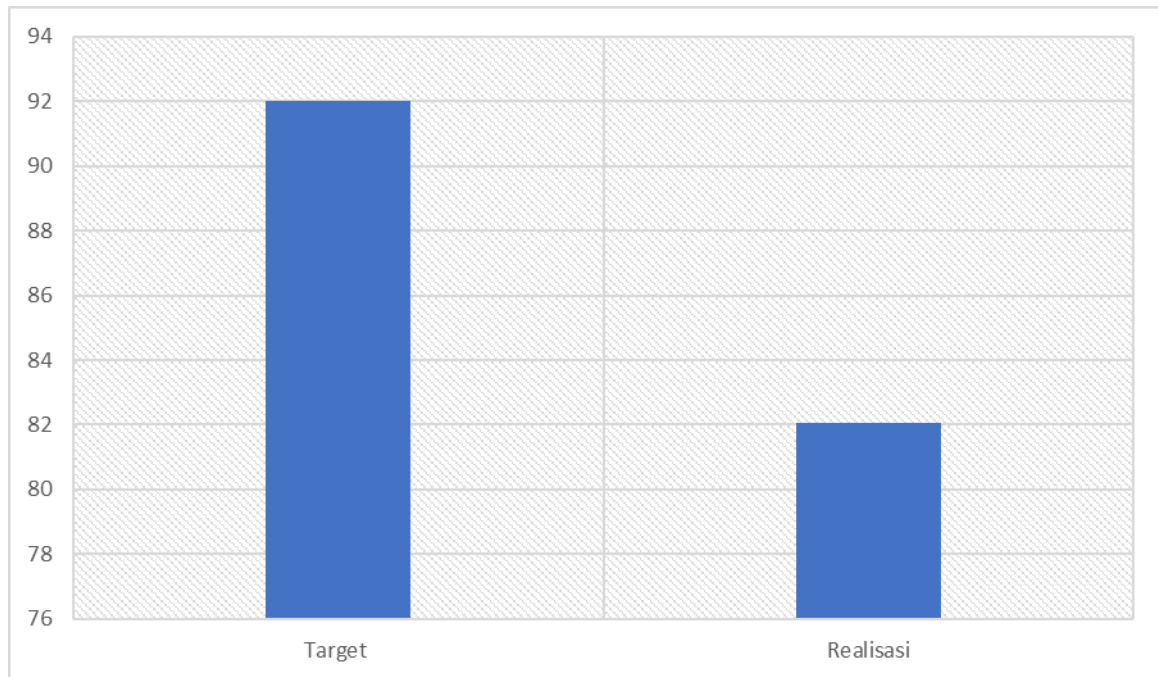
Tabel 2.4

Pengukuran indek kepuasan masyarakat tahun 2021

No	Unsur	Nilai Rata – rata / unsur	Nilai Rata – rata tertimbang	IKM
1	Persyaratan	3.167	0.352	82,07
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3.389	0.376	
3	Waktu penyelesaian	3.222	0,358	
4	Biaya	3.333	0.370	
5	Kesesuaian jenis pelayanan	3.222	0.358	
6	Kopetensi petugas	3.315	0.368	
7	Sikap/prilaku petugas	3.352	0.372	
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.389	0.376	
9	Sarana dan prasarana yang dimiliki	3.185	0.354	

Dari tabel diatas dapat dilihat terjadi peningkatan indek kepuasan masyarakat dari 82,01 pada tahun 2020 menjadi 82,07 di tahun 2021, jika dilihat dari target 92 maka capaian kinerja yaitu 89.

Skor Capaian Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Realisasi sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2021 sebesar 82.07 hampir mencapai target perjanjian kinerja tahun 2021 sebesar 92 hal ini dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

- Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :
 1. Unsur penilaian yang paling besar adalah kemampuan petugas pelayanan dan kesopanan serta keramahan petugas bahwa nilai tersebut sangat penting untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik.
 2. Unsur penilaian yang masih rendah yaitu prosedur pelayanan yang dilaksanakan, prosedur pelayanan harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat.
- Meningkatnya kesadaran pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Bukit Batu akan tanggung jawab tugas pokok dan fungsinya.
- Meningkatnya disiplin pegawai aparatur sipil negara Kecamatan Bukit Batu.

Permasalahan/Hambatan

Pencapaian sasaran yang kurang dari target pada tahun 2021, dipengaruhi beberapa permasalahan/hambatan, antara lain :

- Masih ada pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Bukit Batu yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya.
- Masih ada pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Bukit Batu yang tidak mematuhi aturan kepegawaian.

- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan kepengurusan.
- Belum adanya system aplikasi pelayanan online yang terhubung antara kelurahan/desa dan kecamatan.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain :

- Merencanakan anggaran untuk renovasi fisik Paten (Pelayanan Terpadu Kecamatan)
- Membuat system aplikasi pelayanan online yang menghubungkan kelurahan/desa dengan kecamatan.
- Membuat brosur maupun leaflet untuk dibagikan kepada masyarakat dalam rangka mensosialisasikan persyaratan pengurusan pelayanan perizinan di kecamatan.
- Memperbarui *Standart Operating Procedure* (SOP) pelayanan di kecamatan sesuai kondisi terbaru.
- Menginformasikan secara rutin/berkala tentang perubahan persyaratan pelayanan di website kecamatan.
- Mengadakan pertemuan secara rutin / rapat staf yang dipimpin oleh Camat, dalam rangka koordinasi maupun komunikasi yang intensif antara pimpinan dan staf untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing.

a. Rumusan Kinerja

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 dan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2104 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bengkalis. Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigma pelayanan public telah berubah adalah adanya keberanian Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan riset atau penelitian tentang kinerja layanan publik di lingkungannya. Riset tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada umumnya masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga takaran untuk mengetahui sejauh mana efektivitas berbagai pelayanan publik khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna juga belum diketahui.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui

tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kecamatan Bukit Batu menyelenggarakan survei terkait dengan kepuasan masyarakat. Pemilihan sampel yang tepat, dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang di masyarakat, Diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan. Adapun skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5
Interval Penilaian Kinerja

No	Interval Nilai	Kriteria	Keterangan
1	91 % < 100 %	Sangat Tinggi	Memenuhi target dan berada di atas
2	76 % < 90 %	Tinggi	Persyaratan minimal kelulusan penilaian
3	66 % < 75 %	Sedang	Memenuhi syarat minimal
4	51 % < 65 %	Rendah	Belum memenuhi target dan berada di atas
5	0 % < 50 %	Sangat Rendah	Persyaratan minimal kelulusan penilaian

Untuk meningkatkan upaya pencapaian visi dan misi serta kinerja, Kecamatan Bukit Batu menetapkan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan perjanjian kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional
2. Meningkatnya kenyamanan wilayah
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

b. Sasaran

Penetapan sasaran yang akan dicapai diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
2. Meningkatnya kualitas sosial masyarakat
3. Meningkatnya kualitas capaian kinerja

c. Indikator sasaran

Untuk pengukuran kinerja sasaran yang akan dicapai ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat (Mengukur kepuasan masyarakat dalam periode tertentu)
2. Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik (berdasarkan indeks desa membangun dengan status minimal desa berkembang)
3. Persentase penurunan gangguan kamtibmas (berdasarkan laporan gangguan keamanan dan ketertiban yang diterima melalui laporan resmi)
4. Predikat akuntabilitas kinerja (predikat yang diterima dalam pengolahan SAKIP)
5. persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan (tindak lanjut hasil pemeriksaan dan diselesaikan)

Didalam sasaran 1 kinerja yang ingin dicapai adalah indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat. Rumusan yang digunakan berdasarkan Permenpan dan RB Nomor: 14 tahun 2017 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Beberapa metode digunakan dalam pengumpulan survey ini. Pertama pelayanan, kedua dengan menggunakan kuisisioner online melalui website.

Hasil pengukuran dari survey yang dilakukan pada tahun 2021 dilakukan terhadap 54 orang dengan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan. Lengkapnya sebagai berikut :

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai yang paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai paling cukup tinggi harus tetap dipertahankan, Berdasarkan dari hasil tersebut maka dapat di ambil kesimpulan :

- A. Nilai dalam kelompok paling rendah harus ditingkatkan yaitu pada unsur 1 (satu) yaitu persyaratan dan unsur 9 atau sarana dan prasarana yang dimiliki dengan rata – rata tertimbang 3,16.

Hal itu disebabkan masih dianggap lambat petugas dalam melayani serta belum sesuainya harapan dengan produk layanan yang diberikan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa mendapatkan pelayanan masih belum efektif.

Solusi untuk permasalahan ini adalah peningkatan system informasi pelayanan termasuk penggunaan Teknologi Informasi sesuai perkembangan yang terjadi saat ini serta peningkatan disiplin petugas pelayanan serta pemahaman SOP yang ada, masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- B. Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur Sistem, mekanisme dan prosedur, unsur Penanganan pengaduan, saran dan masukan yaitu dengan nilai rata – rata tertimbang 3,38. Unsur ini menjadi unggul karena Kecamatan Bukit Batu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan system serta mekanisme

dan prosedur yang telah ditetapkan serta Penanganan pengaduan, saran dan masukan yang selalu di berikan oleh masyarakat.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur penilaian yang masih rendah diupayakan dengan memberikan pelatihan, pemantapan teknologi serta memberikan saksi kepada petugas yang melalaikan tugas yang diberikan.

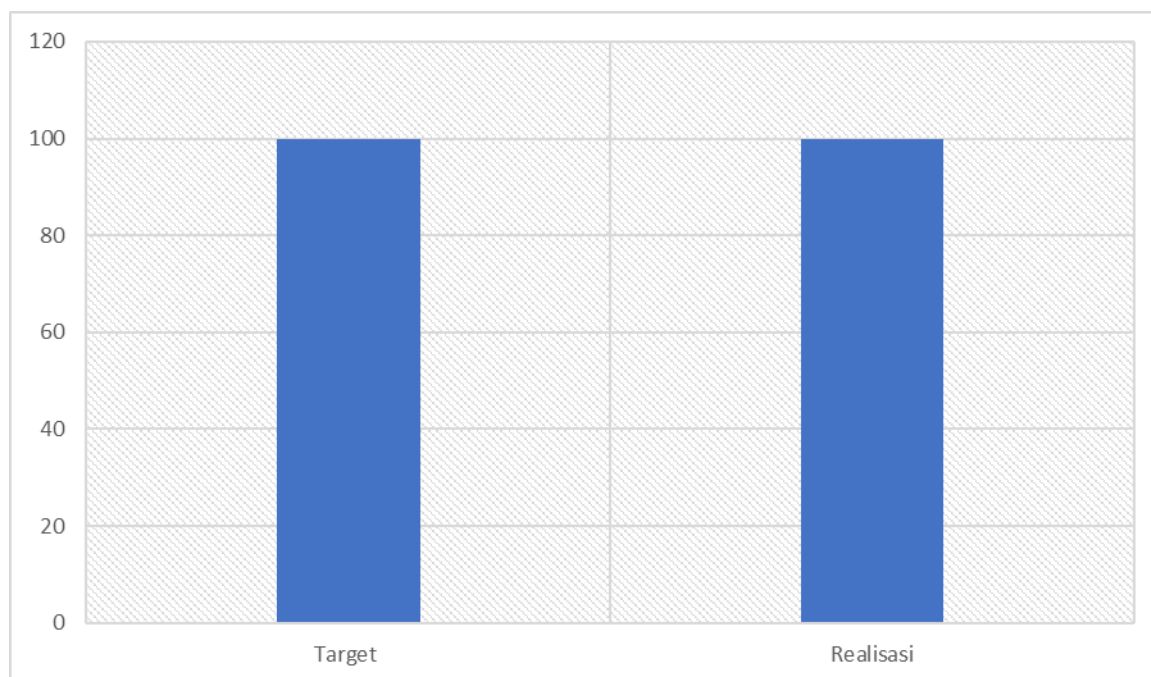
Kepuasan masyarakat merupakan fokus utama Kecamatan Bukit Batu dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan,. Penerapan standar pelayanan diperlukan dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini.

Tabel 2.6
Meningkatnya Kulaitas Sosial Masyarakat

Indikator	2020	2021			Capaian 2021 thdp 2020
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Kelurahan / Desa Dengan Kinerja Baik	100%	100%	100%	100%	100%

Meningkatkan Kualitas social masyarakat, merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pelayanan di Pemerintahan, Meningkatkan Kualitas sosial masyarakat, sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Skor Capaian Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Capaian sasaran meningkatnya Meningkatkan Kualitas Sosial Masyarakat sebesar 100%. sudah cukup untuk menunjukkan keberhasilan kinerja di lingkungan Kecamatan Bukit Batu. Beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu:

- Meningkatnya kesadaran pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Bukit Batu akan tanggung jawab tugas pokok dan fungsinya.
- Meningkatnya disiplin pegawai aparatur sipil negara Kecamatan Bukit Batu.
- Keberhasilan pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Bukit Batu dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari mengikuti bimbingan teknis.

Permasalahan/Hambatan

Capaian sasaran Meningkatkan Kualitas Sosial Masyarakat tahun 2021, tentu masih ada kurang dari beberapa hal, dan ini dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

- Masih ada pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Bukit Batu yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya.
- Masih ada pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Bukit Batu yang tidak mematuhi aturan kepegawaian.
- Terbatasnya pegawai aparatur sipil negara yang mengikuti bimbingan teknis.
- Terbatasnya anggaran untuk mengikuti bimbingan teknis.
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Kecamatan.

Dalam menetapkan desa dengan kinerja baik, Kecamatan Bukit Batu mengukur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang indek Desa Membangun. Hal ini dilakukan agar lebih akuntabel jika dibandingkan jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Pilihan ini didasarkan bukan pada substansi peraturannya, tetapi lebih kepada metode penilaiannya. Walaupun sama-sama dilakukan pengisian indikator oleh masing-masing desa, namun berbeda dalam verifikasinya. Jika mengacu pada pemendagri, pengisian masih dilakukan secara manual dan diverifikasi secara manual juga sehingga berpotensi kurang objektif dan rawan kekeliruan. Kelebihan permendesa dalam input data secara online juga diverifikasi secara berjenjang yang melibatkan kecamatan, provinsi dan kementerian sehingga dianggap lebih akuntabel.

Berdasarkan penetapan status desa dalam Indek Desa Membangun Kecamatan Bukit Batu sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pengukuran indek kinerja desa tahun 2021

NO	DESA / KELURAHAN	IKS	IKE	IKL	IDM	KATEGORI
1	Sungai Pakning					Maju
2	Sejangat	0.8743	0.6167	0.8	0.7637	Maju
3	Dompas	0.8171	0.5667	0.8	0.7279	Maju
4	Pangkalan Jambi	0.8514	0.5833	0.6667	0.7005	Berkembang
5	Sungai Selari	0.7886	0.8333	0.8667	0.8295	Mandiri
6	Buruk Bakul	0.84	0.6	0.8667	0.7689	Maju
7	Bukit Batu	0.8057	0.6	0.6667	0.6908	Berkembang
8	Sukajadi	0.7714	0.55	0.8	0.7071	Berkembang
9	Batang Duku	0.8114	0.6167	0.6667	0.6983	Berkembang
10	Pakning Asal	0.8686	0.7333	0.7333	0.7784	Maju

Kreteria kinerja dianggap baik jika status desa / kelurahan adalah desa berkembang, desa maju, desa mandiri. Sedangkan belum dianggap berkinerja baik jika status desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Dari tabel diatas, dari 1 kelurahan dan 9 desa terdapat 4 (Empat) desa dengan status maju, 1 kelurahan maju, 4 desa berkembang, 1 Desa mandiri Dengan kata lain 1 kelurahan dan 9 desa 100% dengan kategori kinerja baik.

Indek Ketahanan Sosial yang terdiri dari dimensi modal social yang terdiri dari indikator solidaritas sosial, toleransi, keamanan penduduk, kesejahteraan social, dimensi kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, jaminan kesehatan, dimensi pendidikan dasar dan menengah, akses pendidikan non formal, akses ke pengetahuan dan dimensi pemukiman dengan kriteria akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik dan akses ke informasi komunikasi.

Indikator ini yang tertinggi di Desa Pangkalan Jambi, Desa Dompas, Desa Pakning Asal, Desa Sejangat.

Indek Ketahanan Ekonomi yang terdiri dari dimensi ekonomi dengan indikator keragaman produksi masyarakat desa, ketersediaan pusat perdagangan, distribusi logistik, akses ke lembaga keuangan, lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah.

Indikator ini juga tertinggi ditempati oleh desa Sungai Selari, Desa Batang Duku, Desa Pakning Asal, Desa Sejangat.

Indek Ketahanan Lingkungan yang terdiri dari dimensi ekologi dengan indikator kualitas lingkungan, potensi rawan bencana, dan tanggap bencana.

Indikator ini tertinggi Desa Sungai Selari, Desa Pakning Asal dan Desa Buruk Bakul.

Indek Desa Membangun sebagai dasar penetapan desa / kelurahan kinerja baik adalah Desa Pakning Asal.

Sasaran 3 :

Sasaran meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan indikator penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada tahun 2021 masalah gangguan keamanan dan ketertiban umum di kecamatan Bukit Batu masih minim terjadi. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum Kecamatan Bukit Batu bekerja sama dengan pihak berwajib kepolisian dan dukungan babinsa setempat. Sinergi yang baik menghasilkan output yang baik, sehingga gangguan dan ketertiban umum dapat diminimalkan.

Tabel 2.8

Meningkatnya kinerja penurunan gangguan keamanan dan ketertiban

Indikator	2020	2021			Capaian 2021 thdp 2020
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Penurunan gangguan KAMTIBMAS	99,70 %	88 %	100 %	113 %	113 %

Upaya – upaya preventif dengan senantiasa memberikan sosialisasi terhadap dampak – dampak negatif dari sumber gangguan trantibum seperti narkoba, minuman keras dan prostitusi dalam berbagai pertemuan kepada berbagai pihak secara formal dan non formal, tentunya memiliki peran besar dalam meminimalisir gangguan trantibum.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, maka tugas pokok Pemerintah Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pemerintah Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu serta melaksanakan sebagian kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas tersebut diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitasi
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Untuk melaksanakan tugas pokok berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis. Pada Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat; terdiri dari ;
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- f. Seksi Kesejahteraan, Sosial dan Budaya
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mensosialisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberi arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Upaya yang dilakukan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis meliputi penetapan *program* dalam kurun waktu 1 tahun adalah sebagai berikut :

- 1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4) Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum
- 5) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 6) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Semua Pegawai Kecamatan Bukit Batu diharapkan mengerti Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas Pada Kecamatan Sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan untuk itu Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis menjadi buku wajib bagi seluruh pegawai Kecamatan Bukit Batu. Selain Perbup tersebut diperbanyak, secara rutin Camat dalam berbagai kesempatan juga menekankan perlunya pemahaman akan tugas dan fungsi Kecamatan kepada seluruh pegawai.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2021, tingkat kehadiran pegawai Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis tergolong baik yakni sebesar 99 %. Kondisi ini merupakan implikasi dari penerapan kebijakan *Reward and punishment* di Kabupaten Bengkalis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1 Penerapan *Reward And Punishment*

Untuk mencapai tujuan institusi (Kecamatan Bukit Batu) perlu dilakukan *Reward dan Punishment* hal ini bertujuan untuk memberi rangsangan motivasi bagi para pegawai yang memang melakukan fungsi dan tugasnya serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan diantaranya mengusulkan beberapa orang pegawai yang dianggap mampu dan layak untuk menduduki kapasitas yang jabatan yang dimiliki serta mengusulkan untuk mendapat prediket pegawai teladan, disamping itu juga dilakukan pengusulan tanda jasa dalam masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

2.2.2 Penerapan *Punishment*

Disisi lain disamping *Reward* juga dilakukan *Punishment* bagi Pegawai Negeri Sipil baik dari norma-norma agama, sosial dan yang paling penting adalah pelanggaran terhadap

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Punishment yang telah dilakukan yaitu pemberian teguran lisan terhadap pegawai yang melaksanakan tugas tidak tepat waktu dan pegawai yang tidak hadir tanpa izin.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan berbagai permasalahan, tantangan, peluang, hambatan dan kekuatan yang dimiliki pihak Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, maka terdapat beberapa isu-isu strategis Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang didasarkan pada beberapa faktor dari pelayanan OPD Kecamatan Bukit Batu yaitu :

A. Pelayanan Publik

Dalam bidang pelayanan publik ada beberapa isu strategis yang muncul di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis diantaranya :

- Permasalahan strategi yang muncul adalah kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan, hal ini dilakukan mengingat dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis serta cerdas saat ini perlu dilakukannya transparansi, akurasi dalam pelayanan publik.
- Perlunya dilakukannya upaya peningkatan integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah dalam hal pelayanan publik di Kecamatan Bukit Batu. Hal ini ditandai dengan akan dilaksanakannya program pelatihan penerapan system pelayanan prima dengan standart ISO 2008 untuk mendukung program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)
- Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- Harus adanya upaya peningkatan daya dukung infrastruktur pelayanan publik di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.
- Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- Meningkatkan tugas dan fungsi desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

B. Kelembagaan Masyarakat

Dalam hal kelembagaan masyarakat saat ini di Kecamatan Bukit Batu isu strategis yang timbul diantaranya adalah :

- Masih rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif. Masyarakat masih berorientasi dengan Dana yang cukup banyak dimiliki oleh Pemda Kabupaten Bengkalis.
- Masih minimnya peran serta perusahaan swasta maupun daerah serta pelaku usaha lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam hal pembangunan terutama dari perusahaan / pelaku usaha itu sendiri di Kecamatan Bukit Batu.

- Sudah mulai pudarnya sifat kegotong royongan ditengah – tengah masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan aset pemerintah.

C. Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam hal kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Bukit Batu ada beberapa isu strategis yang dapat ditangkap meliputi :

- Rendahnya kesadaran masyarakat atau perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat terlihat dari seringnya terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Bukit Batu.
- Masih belum optimalnya cakupan layanan dan pengelolaan persampahan di Kecamatan Bukit Batu, hal ini dapat dilihat dengan masih minimnya operasional pelayanan persampahan, baru hanya sebatas wilayah perkotaan / ibu kota kecamatan dan itupun belum secara keseluruhan.
- Masih belum optimalnya pemeliharaan serta penggunaan sungai dan saluran drainase yang berada di Kecamatan Bukit Batu. Hal ini dilihat dari seringnya terjadi banjir di wilayah Kecamatan Bukit Batu ketika hujan dalam intensitas besar.

D. Sektor Sarana Prasarana Publik

Dalam sektor sarana prasarana pelayanan publik di Kecamatan Bukit Batu ada beberapa isu strategis yang dapat muncul yakni :

- Masih minimnya sarana prasarana akses transportasi terutama infrastruktur jalan di Kecamatan Bukit Batu terutama bagi desa – desa yang berjarak jauh dari Ibukota Kecamatan yang menjadi akses vital publik di Kecamatan Bukit Batu, sehingga masyarakat agak kesulitan untuk mendapatkan pelayanan.
- Masih minimnya sarana dan infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik, di Kecamatan Bukit Batu sehingga masyarakat belum dapat merasakan pembangunan serta pelayanan maksimal dari pemerintah dan tidak dapat mengembangkan roda perekonomian untuk berkembang lebih pesat lagi.

Secara umum penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Bukit Batu Kabupten Bengkalis berjalan dengan baik sesuai dengan uraian tugas dibagi habis dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun ada beberapa hal yang kritis terhadap penyelenggaraan pelayanan ini adalah keterlambatan yang dirasakan masyarakat apabila ada permasalahan yang melibatkan beberapa pihak terkait dan kompleks.

Salah satu contoh sederhana adalah konflik perbatasan baik itu antar desa, antar kecamatan bahkan antar Kabupaten/Kota. Kondisi seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan segera, hal ini disebabkan harus melibatkan pihak- pihak terkait dan berwenang. Jika

masyarakat tidak diberi pemahaman yang baik akan timbul persepsi tidak profesionalnya aparatur dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Dampaknya terhadap visi dan misi kepala daerah secara langsung tidak secara signifikan berpengaruh terhadap capaian program. Kendala ini hanya sedikit terasa di internal OPD yang sedikit kewalahan menjalankan program- program kepala daerah. Namun hingga saat ini dengan mengandalkan tenaga atau sumber daya aparatur yang ada kendala yang dihadapi bisa diselesaikan walaupun beban kerja dirasakan cukup berat.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ini adalah bagaimanapun dengan sumber daya manusia yang tersedia, semua program dan kegiatan yang dianggarkan bisa diselesaikan dengan sebaik- baiknya. Sedangkan peluang meningkatkan penyelenggaraan tupoksi ini adalah bagaimana agar bisa ditempatkan aparatur yang memadai untuk mengisi pos- pos yang seharusnya berdiri sendiri dan tidak dirangkap oleh aparatur yang minim jumlah dan kemampuannya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Syogyanya rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 mengacu kepada Rancangan Awal Perangkat Daerah (RKPD), namun saat ini data tersebut belum tersedia sehingga diambil kebijakan menyusun berdasarkan renja tahun sebelumnya. Tentunya diselaraskan dengan Rencana Stragis dan penyesuaian terhadap target-target yang belum tercapai.

Untuk lebih jelasnya tentang rincian ini dapat kami sajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Bengkalis

Kecamatan Bukit Batu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Prgram / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR KEWILAYAHAN										
	KECAMATAN				8.383.392.645						
I	Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.971.956.790						
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				84.035.600						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bukit Batu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	68.884.000						
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Bukit Batu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	5.151.600						
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	keKec. Bukit Batu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10.000.000						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.003.500.000						
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bukit Batu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang 14 Bulan	3.000.000.000						

5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Bukit Batu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	3.500.000						
Administrasi Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah					261.600.000						
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Bukit Batu	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	261.600.000						
Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100.668.000						
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Bukit Batu	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	5.500.000						
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Bukit Batu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	35.000.000						
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bukit Batu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	60.168.000						
Administrasi umum Perangkat Daerah					392.947.870						
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bukit Batu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	30.691.360						
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bukit Batu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	74 Paket	51.253.500						
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bukit Batu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5671 Paket	80.000.000						
13	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kec. Bukit Batu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	10 Paket	51.083.010						
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bukit Batu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	29.920.000						
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Bukit Batu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	250 Laporan	100.000.000						

	SKPD		SKPD								
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Bukit Batu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	50.000.000						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					296.843.000						
17	Pengadaan Mebel	Kec. Bukit Batu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	46.843.000						
18	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kec. Bukit Batu	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000						
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bukit Batu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	100.000.000						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					304.956.320						
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bukit Batu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	130.256.320						
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bukit Batu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	150.000.000						
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bukit Batu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	24.700.000						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					527.406.000						
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bukit Batu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37.330.000						
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kec. Bukit Batu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	59.676.000						

	Lapangan										
25	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bukit Batu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	230.400.000						
26	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bukit Batu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	100.000.000						
27	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kec. Bukit Batu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	100.000.000						
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				986.858.950						
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				763.717.000						
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bukit Batu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	22.000.000						
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bukit Batu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	741.717.000						
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan				179.149.950						
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bukit Batu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	179.149.950						
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				43.992.000						

4	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Bukit Batu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	43.992.000						
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.842.308.005						
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				312.500.000						
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bukit Batu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	312.500.000						
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				187.500.000						
2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat aktif	10 Keluarga	187.500.000						
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.263.308.005						
3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Bukit Batu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	6.000.000						
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Bukit Batu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	525.000.000						
4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Bukit Batu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	732.308.005						
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				79.000.000						

5	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Bukit Batu	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	79.000.000					
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				137.999.900					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				32.000.000					
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Bukit Batu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	32.000.000					
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				105.999.900					
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Bukit Batu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	105.999.900					
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				416.000.000					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				416.000.000					
	Fasilitas, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional	Kec. Bukit Batu	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	350 Orang	250.000.000					
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Bukit Batu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1000 Orang	100.000.000					

2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Bukit Batu	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	66.000.000						
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				28.269.000						
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bukit Batu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	11.179.000						
2	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa	Kec. Bukit Batu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	17.090.000						

Hal ini mengisyaratkan perencanaan telah dilakukan dengan cukup baik dan sesuai kebutuhan yang diharapkan. Target kinerja tetap diharapkan 100% seperti halnya tahun sebelumnya.

Catatan penting yang perlu digaris bawahi adalah diharapkan berbagai program dan kegiatan dalam tahap selanjutnya hingga berbentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ini tetap sesuai dengan Renja OPD ini.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tupoksi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, sebagai OPD yang hanya melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian, disamping melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, juga meliputi aspek koordinasi pada lingkup Kecamatan Bukit Batu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Maka Renja Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis lebih banyak berisi program dan kegiatan yang bersifat pelayanan pemerintahan untuk menunjang terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Seperti halnya tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026, maka tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis untuk Tahun 2023 masih sesuai dengan Renstra yaitu :

1. **Tujuannya** adalah : *Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan*
Sasarannya adalah :
 - Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan
Indikator :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat

Penjabaran dari Visi dan Misi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) agenda prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah yang efektif berkeadilan dan tepat sasaran;
2. Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif;
3. Peningkatan aksesibilitas dan penataan infrastruktur dan kawasan pemukiman;
4. Pengelolaan sumber daya alam yang lestari;
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
6. Peningkatan kualitas pemahaman nilai-nilai budaya dan karifan lokal;
7. sinegritas kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya;

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bukit Batu yang di kaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Kecamatan Bukit Batu. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran renja Kecamatan Bukit batu Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Bukit Batu

Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)
Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	92

3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 tertuang pada tabel 3.1 Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Bukit Batu tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2023 sebagai acuan bagi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang berisikan program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja tahun 2023 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis baik Sekretariat maupun Seksi-Seksi. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun Rencana Kerja berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis tahun 2023 sebagaimana terlampir

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024 KABUPATEN BENGKALIS

KECAMATAN BUKIT BATU

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Bidang Penanggung Jawab
							Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	11
U	Bid.U	Prog	Keg	Sub										
7	01	01			Program : Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota				4.971.089.430				7.527.892.471	
7	01	01	2.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				84.035.600				91.439.160	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Bukit Batu	3 Dokumen	68.884.000	APBD		3 Dokumen	75.772.400	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bukit Batu	4 Dokumen	5.151.600	APBD		4 Dokumen	5.666.760	
7	01	01	2.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bukit Batu	10 Laporan	10.000.000	APBD		10 Laporan	10.000.000	

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.003.500.000				4.515.000.000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bukit Batu	35 Orang 14 bulan	3.000.000.000	APBD		35 Orang 14 bulan	4.500.000.000	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bukit Batu	4 Laporan	3.500.000	APBD		4 Laporan	15.000.000	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah				261.600.000				299.926.000	
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bukit Batu	2 Dokumen	261.600.000	APBD		2 Dokumen	299.926.000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.668.000				131.684.800	
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bukit Batu	1 Unit	5.500.000	APBD		5 Unit	15.500.000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bukit Batu	4 Orang	35.000.000	APBD		5 Orang	50.000.000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan	Bukit Batu	10 Orang	60.168.000	APBD		10 Orang	66.184.800	
7	01	01	2.06		Administrasi umum Perangkat Daerah				392.947.870				702.213.311	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bukit Batu	14 Paket	30.691.360	APBD		15 Paket	35.000.000	

7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bukit Batu	74 Paket	51.253.500	APBD		100 Paket	60.500.000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bukit Batu	5671 Paket	80.000.000	APBD		6229 Paket	110.022.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bukit Batu	10 Paket	51.083.010	APBD		10 Paket	56.191.311	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bukit Batu	15 Dokumen	29.920.000	APBD		20 Dokumen	38.500.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bukit Batu	250 Laporan	100.000.000	APBD		250 Laporan	352.000.000	
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bukit Batu	2 Dokumen	50.000.000	APBD		2 Dokumen	50.000.000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				296.843.000				460.500.000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bukit Batu	7 Unit	46.843.000	APBD		15 Unit	60.500.000	
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bukit Batu	1 Unit	150.000.000	APBD		1 Unit	200.000.000	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bukit Batu	15 Unit	100.000.000	APBD		15 Unit	200.000.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				304.956.320				473.400.000	

7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6 Laporan	130.256.320	APBD		6 Laporan	135.000.000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan	150.000.000	APBD		4 Laporan	300.000.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bukit Batu	2 Laporan	24.700.000	APBD		2 Laporan	38.400.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				582.730.000				853.730.000
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Bukit Batu	1 Unit	37.330.000	APBD		1 Unit	37.330.000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bukit Batu	2 Unit	59.676.000	APBD		2 Unit	80.000.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bukit Batu	5 Unit	230.400.000	APBD		5 Unit	236.400.000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitas Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bukit Batu	12 Unit	100.000.000	APBD		8 Unit	400.000.000
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bukit Batu	5 Unit	150.000.000	APBD		5 Unit	100.000.000

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					986.858.950				861.149.950	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					763.717.000				633.508.000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Bukit Batu	2 Laporan	22.000.000	APBD		2 Laporan	27.500.000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bukit Batu	6 Dokumen	741.717.000	APBD		6 Dokumen	606.008.000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan					179.149.950				183.649.950	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bukit Batu	3 Laporan	179.149.950			3 Laporan	183.649.950		
7	01	02	2.04		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					43.992.000				43.992.000	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bukit Batu	5 Laporan	43.992.000	APBD		1 Kegiatan	43.992.000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.842.308.005				2.219.923.405	

7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				312.500.000				680.000.000	
7	01	03	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bukit Batu	5 Laporan	312.500.000	APBD		5 Laporan	680.000.000	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				187.500.000				200.000.000	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat aktif	Bukit Batu	10 Keluarga	187.500.000	APBD		10 Keluarga	200.000.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.263.308.005				1.299.923.405	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Bukit Batu	7 Lembaga	6.000.000	APBD		7 Lembaga	6.000.000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Bukit Batu	10 Unit	525.000.000	APBD		10 Unit	525.000.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas/Ormas	732.308.005	APBD		4 Pokmas/Ormas	768.923.405	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				79.000.000				40.000.000	
7	01	03	2.03	04	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Bukit Batu	1 Laporan	79.000.000			1 Laporan	40.000.000	

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				137.999.900				85.200.000	
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				32.000.0000				50.000.000	
7	01	04	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Bukit Batu	2 Laporan	32.000.0000	APBD		2 Laporan	50.000.000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				105.999.900				35.200.000	
7	01	04	2.02	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Bukit Batu	3 Laporan	105.999.900	APBD		3 Laporan	35.200.000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				416.000.000				560.300.000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				416.000.000				560.300.000	
7	01	05	2.01	02	Fasilitas, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Bukit Batu	350 Orang	250.000.000	APBD		4 Kegiatan	260.000.000	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	Bukit Batu	1000 Orang		APBD		1000 Orang	231.000.000	

						Persatuan dan Kesatuan Bangsa			100.000.000					
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Bukit Batu	4 Dokumen	66.000.000	APBD		4 Dokumen	69.300.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				28.269.000				44.000.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				28.269.000				44.000.000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Bukit Batu	2 Dokumen	11.179.000	APBD		2 Dokumen	22.000.000	
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bukit Batu	2 Dokumen	17.090.000	APBD		2 Dokumen	22.000.000	
TOTAL BELANJA URUSAN									8.383.392.645				11.298.465.826	

Sungai Selari, Februari 2022
CAMAT BUKIT BATU



TAUFIK HIDAYAT, SSTP. MPA
PEMBINA
NIP. 19821205 200212 1 001

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Bukit Batu tahun anggaran 2023 ini disampaikan kepada Bupati Bengkalis sebagai wujud pertanggung jawaban Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis dan sebagai bahan masukan guna menetapkan kebijakan pada masa yang akan datang.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) ini dibuat dalam rangka memenuhi amanat peraturan yang berlaku, renja OPD ini juga harus didukung penganggaran dari Pemerintah daerah dan diharapkan sesuai dengan usulan program dan kegiatan yang diusulkan. Jika usulan ini disesuaikan atau dirasionalkan supaya tidak mengubah hal- hal yang substansi dari yang diusulkan. Jika terdapat perbedaan persepsi antara OPD dengan TAPD diharapkan komunikasi yang intens sebagai jalan penyelesaian.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja Kinerja Kecamatan Bukit Batu Tahun 2023 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaannya dimasa yang akan datang.

Apa yang diusulkan diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya sesuai dengan aturan- aturan yang ditetapkan. Kiranya Renja Kecamatan Bukit Batu Tahun Anggaran 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan kepada stakeholder sehingga dapat memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kecamatan Bukit Batu.

Sungai Selari, Februari 2022

CAMAT BUKIT BATU



TAUFIK HIDAYAT, SSTP. MPA
PEMBINA
NIP. 19820512 200212 1 001

PEMETAAN
PROGRAM / KEGIATAN RENTRA PERANGKAT DAERAH UNTUK TAHUN 2023 TERHADAP
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PEMUTAHIRAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019
(KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021)


KECAMATAN BUKIT BATU

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	RENTRA PD UNTUK TAHUN 2023							PEMUTAHIRAN KEPMENDAGRI (050-5889 2021)							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	SATUAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEGIATAN	PROGRAM	KODE					
KEWILAYAHAN	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7	01	01		KEWILAYAHAN	
	7	01	01	2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah		7	01	01	2.01		
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	01	01	2.01	01
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan Kinerja	Dokumen	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7	01	01	2.01	06
	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang di evaluasi	Dokumen	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7	01	01	2.01	07
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7	01	01	2.02	
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7	01	01	2.02	01
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang di susun	Laporan	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		7	01	01	2.02	07
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		7	01	01	2.03	
	7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Keamanan	Orang	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		7	01	01	2.03	02
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		7	01	01	2.05	
	7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Instruktur Senam	Orang	Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		7	01	01	2.05	01
	7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		7	01	01	2.05	09
	7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Blimtek	Orang	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		7	01	01	2.05	11
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah		7	01	01	2.06	
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang diperlukan	Item	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7	01	01	2.06	01
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis yang diperlukan dan Jumlah Alat kebersihan yang dibutuhkan	Item	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7	01	01	2.06	02
	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan tersedia	Kotak/Porsi	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7	01	01	2.06	04
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang diperlukan, Jumlah Barang Publikasi yang di butuhkan	Item/Lembar	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		7	01	01	2.06	05
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/Tabloid yang disediakan	Tahun	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		7	01	01	2.06	06
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi/koordinasi dalam dan luar daerah	Tahun	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		7	01	01	2.06	09	

7	01	01	05		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diperlukan	Unit	Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel		7	01	01	2.07	05
7	01	01	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang di butuhkan	Unit	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		7	01	01	2.07	06
7	01	01	09		Pengadaan Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang di butuhkan	Unit	Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		7	01	01	2.07	09
7	01	01	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dibutuhkan	Item	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		7	01	01	2.07	11
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah						Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	7	01	01	2.08	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat / Dokumen keluar Jumlah tenaga administrasi Jumlah tenaga ahli administrasi Operator Komputer	Orang/Surat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		7	01	01	2.08	01
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan Air, listrik dan Komunikasi	Tahun/Orang	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		7	01	01	2.08	02
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Sopir yang dibutuhkan	Orang	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		7	01	01	2.08	04
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	01	01	2.09	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Unit	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		7	01	01	2.09	01
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Oprasional atau Lapangan yang diuruskan Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas lapangan, operasional yang di pelihara dan diurus KIR Jumlah Kendaraan Dinas yang diuruskan Pajak	Unit	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Oprasional atau Lapangan		7	01	01	2.09	02
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Tenaga Kebersihan	Orang	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		7	01	01	2.09	09
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguna lainnya	Jumlah bangunan yang dipelihara Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara Jumlah Rehab sedang/berat gedung kantor Jumlah rehab sedang/berat rumah dinas	Kegiatan/Item/ Unit	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguna lainnya		7	01	01	2.09	10
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah bangunan atau pendukung gedung kantor lainnya yang dibangun dan dipelihara	Kegiatan	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		7	01	01	2.09	11
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	7	01	02		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	7	01	02	2.01	
7	01	02	2.01	01	koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah perwakilan unsur kelompok masyarakat yang mengikuti musrenbang	Unsur Kelompok Desa/Kelurahan	Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		7	01	02	2.01	01
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang di laksanakan	Kegiatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		7	01	02	2.01	02
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7	01	02	2.02	
7	01	02	2.20	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Tenaga Administrasi Paten Selama 1 Tahun	Orang	Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		7	01	02	2.20	03
7	01	02	2.04		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat						Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	7	01	02	2.04	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat sebagai tugas pelimpahan	Kegiatan	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		7	01	02	2.04	03

7	01	03	2.02																							
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																7	01	03	2.02		
7	01	03	2.02	01		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta Musrenbang tingkat Kelurahan	Orang	Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										7	01	03	2.02	01	
7	01	03	2.02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya infrastruktur pemukiman di kelurahan sungai	Kegiatan	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										7	01	03	2.02	02	
7	01	03	2.02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah penduduk yang dilayani Jumlah daswisma yang di bina Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan MTQ tingkat kelurahan sungai pakning dan pengiriman peserta MTQ tingkat kecamatan bukit batu terlaksana dan berkualitas	Orang/Kelompok /Kegiatan	Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										7	01	03	2.02	03	
7	01	03	2.03			Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan					Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan										7	01	03	2.03		
7	01	03	2.03	04		Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Kegiatan	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										7	01	03	2.03	04	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																7	01	04			
7	01	04	2.02			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									7	01	04	2.02			
7	01	04	2.02	01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsi di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pemantauan terhadap penyakit masyarakat yang dilaksanakan	Kali	Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsi di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									7	01	04	2.02	01		
7	01	04	2.01			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									7	01	04	2.01			
7	01	04	2.01	02		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat										7	01	04	2.01	02	
7	01	04	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									7	01	04	2.02			
7	01	05	2.01	02		Fasilitas, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional	Jumlah fasilitas koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan	Kegiatan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitas, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional									7	01	05	2.01	02		
7	01	05	2.01	03		Pembina Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembina Persatuan dan Kesatuan Bangsa										7	01	05	2.01	03	
7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan siaga kebakaran Jumlah penduduk yang dilayani Jumlah personel yang siaga	Desa/Kelurahan Orang	Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										7	01	05	2.01	08	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN																7	01	06			
7	01	06	2.01			Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									7	01	06	2.01			
7	01	06	2.01	02		Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa/kelurahan yang berprestasi	Desa/Kelurahan	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa										7	01	06	2.01	02	
7	01	06	2.01	16		Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan	Kali	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa										7	01	06	2.01	16	

CAMAT BUKIT BATU


 AIUHIK HIDAYATI, SSI.P.MPA
 PEMBINA
 NIP. 19820512 200212 1 001